

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan Kawasan Ekonomi Strategis Peterongan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, proses *collaborative governance* dalam pengelolaan Kawasan Peterongan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari kondisi awal (*starting conditions*) yang menunjukkan adanya ketimpangan peran antara pemerintah dan pedagang, serta rendahnya tingkat kepercayaan antar aktor. Pedagang cenderung berada pada posisi sebagai objek kebijakan, bukan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan.

Dari aspek *institutional design*, meskipun terdapat aturan dalam pengelolaan kawasan, namun mekanisme partisipasi pedagang masih terbatas. Transparansi dalam pengelolaan juga belum sepenuhnya terbuka, sehingga tidak mendorong keterlibatan aktif dari pelaku usaha dalam pengembangan kawasan.

Selanjutnya, pada aspek *collaborative process*, interaksi antara pemerintah dan pedagang belum menunjukkan adanya proses kolaborasi yang berkelanjutan. Komunikasi yang terjadi masih bersifat terbatas, serta belum didukung oleh forum dialog yang rutin. Kondisi ini menyebabkan tidak terbentuknya kepercayaan dan komitmen bersama dalam pengelolaan kawasan.

Pada aspek *outcomes*, kebijakan yang diterapkan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan usaha pedagang. Kondisi usaha pedagang cenderung stagnan, dan tingkat kepuasan terhadap pengelolaan kawasan masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari proses pengelolaan belum mampu menjawab kebutuhan riil pelaku usaha.

Kedua, hambatan pengembangan usaha pedagang di Kawasan Peterongan merupakan hasil dari interaksi antara faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, pedagang menghadapi keterbatasan dalam hal strategi usaha, inovasi produk, serta kemampuan dalam beradaptasi terhadap perubahan pasar. Pedagang cenderung menjalankan usaha dengan mengikuti tren tanpa adanya diferensiasi yang jelas, sehingga memperkuat persaingan antar sesama pedagang.

Dari sisi eksternal, pedagang menghadapi tekanan dari meningkatnya persaingan dengan pelaku usaha lain yang lebih modern, serta perubahan perilaku konsumen yang cenderung mengutamakan kenyamanan dan kemudahan. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha masih bersifat terbatas dan belum menyentuh aspek penguatan kapasitas usaha secara langsung.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Kawasan Ekonomi Strategis Peterongan belum didukung oleh proses kolaborasi yang kuat antar aktor, serta belum mampu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh pedagang. Kondisi ini menyebabkan aktivitas ekonomi di kawasan cenderung berjalan secara individual tanpa adanya pengembangan yang terarah.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, menunjukkan bahwa Pemerintah perlu memperkuat peran sebagai fasilitator dalam membangun proses kolaborasi yang lebih inklusif. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan ruang partisipasi yang jelas bagi pedagang, seperti forum komunikasi rutin antara pemerintah dan pelaku usaha. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan kawasan agar dapat membangun kepercayaan antar aktor. Pemerintah juga disarankan untuk tidak hanya memberikan dukungan dalam bentuk promosi, tetapi juga melalui program yang berfokus pada peningkatan kapasitas pedagang, seperti pelatihan usaha, pendampingan, serta akses terhadap permodalan.

Lebih lanjut, Pedagang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha, khususnya dalam hal inovasi produk dan strategi pemasaran. Pedagang juga perlu lebih adaptif terhadap perubahan pasar, termasuk dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana untuk memperluas jangkauan usaha.

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perdagangan harus segera mengambil langkah konkret di lapangan untuk mengatasi tantangan digitalisasi dan stagnasi usaha dengan tidak sekadar bersandar pada status regulasi kawasan strategis. Intervensi nyata perlu diwujudkan melalui program pendampingan literasi digital yang intensif dan inklusif usia, khususnya bagi pedagang lanjut usia, dengan melibatkan komunitas anak muda atau akademisi sebagai fasilitator pemanfaatan platform *e-commerce*. Selain itu, pemerintah perlu memfasilitasi diversifikasi usaha

dan inovasi produk melalui inkubasi bisnis serta penataan zonasi kreatif yang mampu menarik minat konsumen generasi baru, sehingga pasar tradisional Peterongan memiliki daya saing yang kuat dalam menghadapi gempuran toko modern dan belanja daring. Di sisi lain, untuk meruntuhkan paradoks kawasan strategis yang belum inklusif, pengelola kawasan wajib merancang mekanisme partisipasi bermakna (*meaningful participation*) yang melibatkan masyarakat setempat secara luas, bukan hanya terbatas pada paguyuban pedagang. Forum musyawarah berkala antara pemerintah, pengelola, pelaku UMKM, dan perwakilan warga non-pedagang harus dihidupkan untuk menjamin bahwa arah kebijakan pengelolaan mengakomodasi kepentingan seluruh ekosistem lokal. Melalui pendekatan kolaboratif ini, pemerintah daerah dapat menyusun program pemberdayaan berbasis komunitas dan memberikan prioritas penyerapan tenaga kerja bagi warga sekitar, sehingga manfaat ekonomi dari pengembangan Kawasan Strategis Peterongan dapat terdistribusi secara adil, merata, dan berkelanjutan.